

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di Indonesia dimulai saat tumbangnya Orde Baru dengan turunnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sistem politik yang dilaksanakan pada zaman Orde Baru memberikan batasan yang signifikan terhadap perkembangan politik dengan adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga keputusan mengenai kebijakan terkait negara secara mutlak dipegang oleh Soeharto termasuk sistem kepartaian pada pemilu di Orde baru. Pemusatan kekuasaan ini terjadi karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik di Indonesia, tidak hanya jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tetapi juga karena pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia. Hal ini juga dapat ditemui dengan adanya prinsip monoloyolitas pegawai negeri sipil (PNS), pada awalnya prinsip itu diperlukan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan yang mungkin timbul dari pihak yang menentang Orde Baru dengan mewajibkan seluruh PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum. Kekuasaan juga ditandai dengan adanya penggabungan (*fusi*) partai, dimana pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno terdapat 10 partai yang berkembang, kemudian dilaksanakan fusi sehingga menghasilkan 2 partai

selain Golongan Karya. Partai tersebut yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan hasil fusi dari partai ideologi Islam, sedangkan partai Nasionalis bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Prinsip monoloyalitas yang diterapkan Soeharto pada proses pemilu menyebabkan terkendalanya sistem politik, kemenangan mutlak diraih secara terus-menerus oleh Golkar pada zaman Orde Baru membuat masyarakat resah, tidak hanya itu adanya krisis moneter yang berlangsung secara besar-besaran membuat masyarakat semakin berkeinginan untuk mengakhiri Orde Baru ini. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat melakukan unjuk di berbagai tempat dan pada akhirnya berhasil melengserkan kepemimpinan Soeharto.

Pasca Orde Baru memberikan pelajaran berharga bahwa pelanggaran terhadap demokrasi memberikan dampak yang buruk terhadap sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu demokrasi di Indonesia mulai ditegakkan kembali dan kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan semestinya. Langkah-langkah demokratisasi pada zaman Reformasi dapat dilihat kemajuannya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002) perubahan pada UU Partai Politik, UU pemilu dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik sebelumnya sehingga pemilu pada zaman Reformasi ini menjadi lebih demokratis yang diakui oleh dunia internasional¹. Perkembangan sistem demokrasi pada masa Reformasi juga ditemui pada hasil

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1993 hal 134

amandemen UUD 1945 yang memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (pilpres) serta pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur pada UU no 32 tahun 2004.

Pelaksanaan pemilu secara langsung dimulai pada tahun 2004 yang kemudian menjadi tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik di Indonesia, dengan menggunakan azas pemilu yakni langsung, umum, bersih, jujur serta adil, masyarakat Indonesia dengan mudah dapat memilih calon Legislatif dan calon Presiden yang nantinya akan menduduki kursi di pemerintahan. Kebebasan dalam berorganisasi yang saat ini telah dimiliki bangsa Indonesia membuat masyarakat sadar akan fungsinya sebagai penentu keberlangsungan negaranya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl (1971) adalah adanya kebebasan di dalam membantuk organisasi, termasuk partai politik². Oleh karena itu pasca rezim otoriter Presiden Soeharto yang membatasi masyarakat dalam berpolitik, perkembangan partai mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana partai yang dulu terpaksa harus berfusi kedalam partai tertentu, kini berkembang ibarat jamur di musim penghujan dan membuka diri terhadap perubahan yang menghasilkan banyak partai politik tanpa harus mengikuti asas partai sebelumnya yakni Pancasila sebagai satu-satunya asas. Partai yang telah berkembang dapat menganut ideologi yang pernah mereka pakai sebelumnya, hanya saja ikatan-ikatan ideologi dari partai tersebut tidak sekuat seperti pada tahun 1950-an. Disamping ideologi

² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*”, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 57

komunisme masih dilarang, partai-partai itu masih harus tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi bersama³. Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru, kita lebih cenderung menganut sistem multipartai. Di samping digerakkan oleh proses demokrasi yang terus berlangsung, sistem ini didasari oleh realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Di dalam masyarakat demikian, tidak hanya dipisahkan secara kelompok melainkan juga oleh beragam kepentingan.

Pemilu secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia memberi ruang yang sangat bebas terhadap para kandidat calon yang akan menduduki kursi pemerintahan, apabila kita melihat dari kesejarahan lahirnya bangsa ini, maka tidak menutup kemungkinan para purnawirawan TNI/Polri dapat bergabung dalam partai politik. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya keterlibatan militer baik secara aktif berperan pada pemerintahan presiden Soekarno maupun hanya sebagai penggerak pemerintahan dan penegakan rezim otoriter pada pemerintahan Presiden Soeharto. Kebebasan ini didasari pada UU pemilu, UU partai politik yang telah mengalami amandemen pada tahun 1999, sehingga berbagai golongan dapat berperan aktif dalam politik.

Berbicara mengenai militer di Indonesia, hubungan antara militer dengan penduduk sipil sangat tidak bisa di dilepaskan dari karakter sistem politiknya. Di negara otoriter atau totaliter, pengaruh militer dalam kehidupan politik sangat besar, lain halnya di negara-negara demokratis, pengaruh militer cenderung mengecil, karena adanya paradigma supremasi sipil atas militer. Militer dengan demikian berada di bawah kendali politisi sipil. C. Wright Mills

³ Ibid hal 62-63

(1956) pernah menyebutkan bahwa militer merupakan satu dari tiga kelompok yang paling berpengaruh secara politik, pengaruh itu khususnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertahanan dan politik luar negeri⁴.

Dengan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia persepsi tentang karakter pemimpin yang baik juga memiliki perbedaan, ada masyarakat yang membutuhkan sosok pemimpin yang berasal dari kalangan pengusaha, ada pula masyarakat yang menginginkan pemimpin yang dari kalangan militer. Berbicara soal pemimpin militer masyarakat Indonesia saat ini merindukan presiden yang tegas, melihat carut marut kondisi bangsa dan negara kita saat ini dan kepemimpinan nasional yang kurang tegas (serta lemah), muncul kerinduan di masyarakat akan sosok pemimpin yang dianggap berani dan tegas. Persepsi ini timbul dengan terpilihnya purnawirawan Jendral TNI Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua periode pemilu yakni pemilu 2004 dan pemilu 2009, tidak hanya itu pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh purnawirawan TNI membuktikan bahwa masyarakat percaya terhadap calon presiden yang memiliki latar belakang militer.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan presiden yang berlatar belakang militer sebagai pemimpin negara Indonesia juga memiliki kelebihan dalam memimpin negara, beliau meyakini bahwa segala apa yang kita inginkan akan tercapai, yang terpenting kita berusaha (ikhtiar) dan berdoa. Pada saat beliau menjalankan amanah dari rakyat sebagai presiden,

⁴ Ibid, hal. 243

beliau selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Harus bisa dan tegas merupakan tipikal kepemimpinan SBY yang dimilikinya, hal ini ditunjukkan dengan adanya tekad SBY yang sangat kuat saat mengunjungi distrik Yakuimo yang terisolasi di Papua pada tahun 2006. Sebagian kecil masyarakat menilai dalam pemerintahan SBY tidak tegas dan lamban dalam mengatasi masalah di Indonesia, padahal sejatinya SBY adalah sosok yang tegas dan peduli. Ketegasan yang dimiliki SBY muncul saat ia melaksanakan pembekalan konsolidasi pemerintah dengan bupati dan ketua DPRD kabupaten se-Indonesia di Lemhanas, 2008. Saat melihat ada salah satu peserta yang mengantuk, presiden langsung menghentikan pidatonya dan berkata “kalau mengantuk keluar saja .. seharusnya anda merasa berdosa pada rakyat. Sebagai pemimpin anda punya tanggung jawab dan mengemban amanah rakyat. Saat kita bicarakan masalah rakyat kok malah tidur”⁵.

Dua periode atau sepuluh tahun sudah negara Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak konflik maupun prestasi yang di dapat saat pemerintahan SBY. Segala konflik dan prestasi yang didapat ini, di pengaruh oleh gaya pemerintahan SBY dan sistem pemerintahan yang SBY lakukan. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh SBY dalam pemerintahannya selama sepuluh tahun belakangan ini yakni pertama SBY dalam tipe militeristik, hal ini disebabkan karena mempengaruhi corak kepemimpinan seseorang bisa berupa pendidikan dan pengalaman. Dari segi pendidikan dan pengalaman inilah yang mengindikasikan bahwa SBY

⁵ <http://www.kompasiana.com/post/read/644901/3/model-kepemimpinan-sby.html> diposting oleh Musyfiqul Khoir pada 05/04/2014 |22:39, diakses tanggal 13-10-2014 pukul 22:15

memiliki gaya militeristik karena SBY merupakan lulusan terbaik AKABRI dan mengabdikan sebagai perwira TNI selama 27 tahun, serta meraih pangkat Jendral TNI tahun 2000. SBY juga merupakan seorang militer intelektual, tingkat intelektualitas SBY tampak lebih menonjol dan analisa yang dimilikinya lebih tajam. Selain itu gaya militeristik SBY tergambar dari tindakan-tindakannya SBY dalam pelaksanaan administrasi negara yang formalitas dan kaku. Ini merupakan salah satu karakteristik dari gaya kepemimpinan militeristik yaitu segala sesuatu bersifat formal. Terlihat dari pelaksanaan pemerintahan SBY yang berjalan dengan prinsip bahwa segala sesuatunya sesuai dengan peraturan artinya setiap pikiran baru harus bersabar untuk menunggu sampai peraturannya berubah dulu, sehingga terobosan menjadi barang langka.

Kedua, SBY dalam tipe karismatik adalah tipe yang menjadi keunggulan dari dirinya. Sikap karisma yang dimilikinya bukan hanya tebar pesona tapi benar-benar diperhitungkan secara matang. Karisma yang dimiliki oleh SBY adalah karisma yang berkarakter, dimana karakter ini merupakan karakter seorang pemimpin masa depan yang mampu memimpin masa depan yang mampu memimpin rakyatnya dengan baik⁶. Karisma yang ada di dalam diri beliau adalah karisma yang telah menyatu karena memiliki kepribadian yang unggul. Unggul dalam segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, ataupun pendidikan.

⁶ Djohar, Hendra Andrianto, "Perbedaan Tipe Kepemimpinan Antara SBY, JK, dan Boediono Dalam Proses Pengambilan Keputusan <http://www.scribd.com/doc/24364039/Analisa-Politik> Diakses pada 13-10-2014 | 21:45

Tipe ketiga yang terdapat dalam diri SBY adalah tipe demokratis. Tipe demokratis yang terdapat dalam dirinya disebabkan karena tuntutan reformasi, situasi dan kondisi saat ini yang semakin liberal. Dimana tipe pemimpin dengan gaya ini dalam mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan, namun keputusan tetap berada di tangannya. Selain itu pemimpin yang demokratis berusaha mendengar berbagai pendapat, menghimpun dan menganalisa pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat. Secara teoritis pemimpin tipe ini bisa menerima kritik, kritik dibalas pula dengan kontra kritik. Bukan menjadi rahasia lagi bila sering kali kita melihat dan mendengar bagaimana SBY melakukan kontra kritik terhadap orang-orang yang mengkritiknya. SBY percaya bahwa kebenaran hanya bisa diperoleh dari wacana publik yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Oleh karena itu dirinya ikut turut campur tangan langsung atas setiap kebijakan yang akan dikeluarkan kementerian, ia ingin tau secara detil landasan dari kebijakan yang hendak diambil⁷.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo dikenal sebagai calon presiden yang diusung Partai Gerindra yang dia pimpin pada pemilu presiden tahun 2014. Prabowo mengawali karier di dunia militer dengan mendaftar di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970. Prabowo lulus dari Akademi Militer Magelang pada tahun 1974. Sejumlah jabatan militer diembannya, diawali sebagai Komandan Peleton Para Komando Grup 1 Kopassandha (1976).

⁷ Ibid

Selanjutnya Prabowo juga pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996) Disusul Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (1996-1998). Pada tahun tahun 1996, Prabowo memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka. Operasi berhasil menyelamatkan 10 peneliti. Pada tahun 1997, Prabowo memprakarsai pengibaran bendera merah putih di Puncak Everest. Sejumlah penghargaan berhasil diraihny dalam karier militer. Seperti di antaranya Bintang Kartika Eka Paksi Naraya, Satyalancana Kesetiaan XVI, Satyalancana Wira Karya, The First Class The Padin Medal Ops Honor dan Bintang Yudha Dharma Naraya. Sosok Prabowo kerap dikaitkan dengan kegiatan penculikan terhadap sejumlah aktifis pro-reformasi pada tahun 1997. Berikut kutipan Haryanto Taslam yang menjadi korban pada tahun 1997 dan kini tergabung dalam kepengurusan Partai Gerindra⁸.

“Saya adalah korban Prabowo dan beliau adalah korban politik saat itu. Dia juga korban. Dia hanya tentara yang mematuhi perintah atasannya”.

Di dunia politik, Prabowo memulainya dengan mencalonkan diri sebagai sebagai salah satu calon presiden dari Partai Golkar pada tahun 2004. Namun dia kalah suara dari Wiranto. Prabowo kembali menjajal peruntungannya di Pemilu 2009 dengan mendirikan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Pada Pilpres 2009, Prabowo berduet dengan Megawati Soekarno Putri sebagai

⁸ <http://neomisteri.com/2014/03//membaca-watak-dan-karakter-capres-prabowo-subianto/> diposting pada tanggal 23/03/2014, diakses pada tanggal 16-10-2014 pukul 13:45

Capres dan Cawapres, namun saat pemilihan pasangan ini kalah dari pasangan SBY-Boediono yang diusung Partai Demokrat.

Pada pemilu 2014 kemenangan hampir diraih oleh pasangan Prabowo-Hatta Rajasa hal ini dibuktikan dengan kemenangan mutlak yang diraih pasangan tersebut di Sumatera Barat dan hasil ini merupakan salah satu lumbung suara dari pasangan tersebut. Pengamat politik dari Universitas Negri Padang (UNP) Nora Eka Putri menilai ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan ini meraih suara terbanyak yakni dikarenakan solidnya kerja tim sukses partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih yang mengukung Prabowo-Hatta, warga Sumatra Barat yang merupakan pemilih rasional sulit tertipu oleh pencitraan yang dilakukan oleh calon presiden pada kampanyenya mereka memilih pemimpin berdasarkan ketokohnya, berdasarkan kualitasnya serta berdasarkan visi, misi dan kinerjanya. Tayangan televisi yang menyiarkan secara langsung acara debat capres-cawapres sangat membantu tingkat rasionalitas warga Sumatra Barat, mereka bisa menilai para kandidat itu berdasarkan visi dan misinya. Hal lain yang menyebabkan kemenangan mutlak pasangan Prabowo-Hatta ini diraih karena psikologis warga Sumatra Barat yang budayanya terkenal religius, pernyataan kubu lawan yang akan menghapuskan perda bernuansa syariah di setiap daerah kecuali Aceh apabila menjadi presiden membuat masyarakat Sumatra Barat berpikir panjang jika harus memilih kubu lawan. Hal ini dikarenakan tingkat pemerintahan daerah di Sumatra Barat kebanyakan menerapkan perda syariah tersebut dan didukung oleh masyarakat. Karena falsafah adat Minangkabau di Sumatra Barat yakni

“*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” hal ini sangat diresapi oleh warga. Faktor tersebut lah yang menyebabkan kemenangan telak di raih pasangan Prabowo-Hatta di Sumatra Barat⁹.

Tidak hanya itu potensi kemenangan tim Prabowo-Hatta juga dapat dijumpai pada pemilu di Provinsi Jawa Barat dimana terdapat beberapa faktor kemenangan yakni pertama peran kepala daerah Jawa Barat sangatlah besar dalam mendukung pasangan nomor urut 1 ini dengan keterlibatannya secara langsung sebagai tim kemenangan untuk Jawa Barat, ditambah lagi bupati dan walikota Jawa Barat juga berasal dari parpol Koalisi Merah Putih. Kedua, kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pasangan Prabowo-Hatta lebih efektif menarik simpati warga provinsi ini. Ketiga, mesin-mesin parpol Koalisi Merah Putih sudah bekerja hingga tingkat bawah dengan minimnya berita perpecahan sikap elit parpol di Jawa Barat. Keempat, peran media telah dimaksimalkan untuk menggalang dukungan, hal ini turut mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih¹⁰.

Masyarakat menilai pasangan Prabowo-Hatta merupakan sosok yang tegas, kepribadiannya bagus, berpengalaman dalam memimpin, merakyat, serta cerdas. Kecerdasannya dapat dinilai dari visi misi yang disampaikannya pada pemilu 2014 lalu yang sebagian besar mempertahankan kedaulatan NKRI dan peduli terhadap pertanian di Indonesia sehingga sebagian besar pendukung

⁹ <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/7/14/n80kff-4-faktor-prabowohatta-menang-telak-di-tanah-minang> diposting oleh Muhammad Hafid pada 14-07-2014| 09:33 WIB diakses tanggal 13 Oktober 2014 | 19:45

¹⁰ www.aktual.co/politik/210606empat-faktor-utama-dorong-kemenangan-prabowo dimuat oleh Ari Purwanto pada Selasa, 08-07-2014 | 21:55 diakses pada tanggal 13-10-2014 | 22:45

pasangan Prabowo-Hatta adalah petani hal ini sesuai dengan hasil survey LSN yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 juni 2014 terhadap 1070 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Dari deskripsi pemimpin Indonesia yang memiliki latar belakang militer dapat dikatakan bahwa masyarakat masih mendambakan sosok pemimpin yang memiliki latar belakang militer. Pemimpin yang memiliki latar belakang militer cenderung memiliki jiwa nasionalisme dan patriotik yang sangat tinggi, dengan bekal pengalaman dan pendidikan selama masih aktif menjadi prajurit TNI hingga menjadi Perwira (selama belasan/puluhan tahun) sikap nasionalisme dan patriotisme yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Hal ini menjadi sangat penting sebagai modal untuk menjadi pemimpin negara yang sedang mengalami keterpurukan saat ini. Dengan sikap nasionalisme dan patriotisme yang kuat, akan muncul panggilan jiwa yang tulus untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. Hal ini sangat sesuai dengan hasil survey Lembaga Survey Nasional (LSN) yang menyiratkan bahwa capres dari kalangan TNI masih disukai karena masyarakat saat ini merindukan sosok Presiden yang tegas¹¹.

Oleh karena itu penulis mengambil penelitian skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Terhadap Calon Presiden Berlatar Belakang Militer”**. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wirobrajan, alasan pengambilan lokasi di Kecamatan Wirobrajan karena dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta Kecamatan Wirobrajan merupakan kecamatan yang berada di tengah-tengah

¹¹ <http://yhohannesneoldy.wordpress.com/2013/07/25/alasan-capres-berlatar-militer-dan-berkarakter-tegas-layak-dipilih-di-2014/> diakses pada tanggal 10-06-2014 pukul 10:29

baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat perekonomian swadaya, maupun letak geografisnya. Tidak hanya itu penduduk Kecamatan Wirobrajan yang majemuk menjadi daya tarik penulis dalam melaksanakan penelitian ini, dimana pada Kecamatan ini dapat ditemukan banyaknya pendatang dari luar provinsi DIY yang menetap di wilayah ini untuk menempuh pendidikan maupun membuka peluang karir, sehingga persepsi masyarakat terkait pencalonan presiden pun berbeda pula sesuai dengan karakteristik individu yang ada di Kecamatan wirobrajan ini.

Penulis juga ingin membuktikan bagaimana persepsi masyarakat tentang pemimpin yang memiliki latar belakang militer di Kecamatan Wirobrajan, apakah layak menjadi presiden atau masyarakat tidak lagi memandang latar belakang sosial seorang calon untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah negara.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat perjalanan pemilu yang telah dilaksanakan secara langsung sudah melewati tiga babak besar yakni pemilu 2004, 2009, dan pemilu 2014 pasca reformasi, dimana pada ketiga pemilu tersebut kandidat calon presiden berlatar belakang militer masih mendominasi sebagai kandidat, mengingat peluang capres yang berlatar belakang militer cukup terbuka lebar di era demokrasi ini.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari penjabaran latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

“Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta terhadap calon presiden yang memiliki latar belakang Militer pada pemilu presiden tahun 2004, 2009, 2014”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap calon presiden yang memiliki latar belakang militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap calon presiden pada pemilu langsung tahun 2004-2014
2. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kepemimpinan yang berlatar belakang militer
3. Memberi informasi terkait sistem pemerintahan yang baik di Indonesia

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori diharapkan menjadi sebuah acuan secara konsep yang nantinya dapat digunakan dalam memandang, menilai dan menganalisis sebuah permasalahan. Kerangka teori juga dapat menjadi bahan perbandingan terhadap konsep yang ada dengan sebuah kondisi nyata yang dikemudian hari selain dapat menganalisis suatu permasalahan juga dapat menemukan suatu konsep baru yang lebih matang sesuai perkembangan zaman.

Menurut Masri Singarimbun :

“Teori adalah serangkaian konsep, deffinisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut¹².

Adapun kerangka teori pada permasalahan ini adalah :

1. Persepsi

Kata “Persepsi” sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan hasil argument yang dipaparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan secara umum dan sederhana yaitu argument dari setiap individu mengenai tanggapan terhadap suatu informasi maupun peristiwa baik yang dilihat secara langsung maupun yang hanya disampaikan oleh orang ketiga. Untuk memberikan penjelasan yang terperinci, berikut yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Leavit, persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Wittig persepsi adalah proses menginterpretasikan stimulus oleh seseorang (*perception is the process by which a person interprets sensory stimuli*), persepsi muncul dari beberapa bagian pengalaman sebelumnya. Sedangkan menurut William James persepsi

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet, ke-2, hal 37

terbentuk atas dasar data-data yang diperoleh di lingkungan yang diserap oleh panca indera serta sebagian lainnya diperoleh dari ingatan (memori) kita dan kemudian diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita peroleh¹³.

Dengan perkataan lain lingkungan sangat aktif berinteraksi dengan manusia yang melalui inderanya menangkap rangsangan sampai akhirnya timbul makna yang spontan yang akan ditampilkan dalam perilaku, dengan demikian perilaku individu tidak terlepas dari persepsinya. Persepsi seseorang terhadap suatu objek akan dipengaruhi sejauh mana pemahamannya terhadap objek persepsi yang belum jelas atau belum dikenal sama sekali tidak akan mungkin memberikan makna. Persepsi akan timbul setelah seseorang atau sekelompok manusia terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan setelah dirasakan akan menginterpretasikan objek yang dirasakan tersebut, seperti pendapat Kimball young “persepsi merupakan suatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan, memahami objek fisik maupun sosial¹⁴.

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberikan interpretasi yang berbeda tentang objek yang dilihatnya itu, secara umum ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.

¹³ Adi Isbandi, *Psikologi Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1994, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, hal 105

¹⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Yogyakarta*, Yogyakarta, 2003, Andi Yogyakarta, hal 89

Pertama, diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut mempengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.

Kedua, sasaran terhadap persepsi tersebut. Sasaran yang digunakan dalam persepsi itu bisa berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu bisaanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran. Tindak-tanduk dan cirri-ciri lain dari sasaran persepsi itu turut menentukan cara pandang orang dalam melihatnya.

Ketiga, faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan fakta yang turut berperan dalam pertumbuhan persepsi seseorang¹⁵.

Sejalan dengan ini Kasali mengemukakan bahwa faktor-faktor lain yang juga menentukan persepsi yaitu¹⁶ :

- a. Latar belakang budaya
- b. Pengalaman masa lalu
- c. Nilai-nilai yang dianut
- d. Berita-berita yang berkembang

¹⁵ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, 1989, Jakarta, Haji Masagung, hal 10

¹⁶ Rhenald Kasali, *Manajemen Publik Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, 1994, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti hal. 23

Menurut Rukminto, didalam membicarakan persepsi maka ada beberapa hal penting yaitu¹⁷ :

1. *Impression Formation*

Proses dimana informasi tentang orang lain diubah menjadi pengetahuan/pemikiran yang relatif menyerap orang tersebut. Hal ini terbentuk melalui

- a. Pengkategorian (klasifikasi) berdasarkan teori kepribadian yang implisit
- b. Mempertimbangkan/kombinasi segi positif dan negative
- c. Praduga

2. *Attribution*

Morgan, King, Weiz dan schopler melihat bahwa attribution dan inferences terjadi karena manusia tidak mempunyai akses untuk mengetahui pikiran, motif ataupun perasaan seseorang, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menduga perilaku yang akan dilakukan orang tertentu pada saat yang lain.

3. *Sosial Relationship*

Kehadiran orang lain mempengaruhi tingkah laku. Bentuk tingkah laku dapat terbentuk karena :

- a. Imitasi (peniruan)

¹⁷ www.Repository.usu.ac.id/bitsream/123456780/30485/3/chapter%2011.pdf diposting oleh RH Yanti tahun 2011, diakses pada tanggal 15-10-2014 pukul 01:28

- b. Konformitas (mirip imitasi tetapi ada sanksi jika tidak ditiru)
- c. Kepatuhan (banyak diterapkan dalam militer dan sanksinya berat)

4. Perhatian

Perhatian merupakan perumusan atau konsentrasi dan seluruh aktifitas ditentukan kepada sesuatu atau sekelompok objek

Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang di persepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi¹⁸

2. Sistem Pemilihan Umum Presiden

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan sekaligus menjadi tolak ukur dari demokrasi tersebut. Di Indonesia pemilihan umum merupakan salah satu metode politik atau cara warga negara memilih wakil rakyat, wakil daerah dan wakil dari sebuah negara serta membentuk pemerintahan (eksekutif) yang demokratis dan

¹⁸ Jalaluddin, R. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Edisi kesepuluh. Bandung: Rosdakarya.

memilih wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat (legislatif) yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (jurdil). Meskipun pemilu bukanlah satu-satunya lahan untuk melaksanakan demokrasi, namun melaksanakan pemilu memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungan demokrasi sebuah negara karena banyak poin yang menjadikan pemilu tersebut penting, antara lain :

1. Melalui pemilu kedudukan rakyat sebagai penentu keberlangsungan suatu negara dalam penentuan pemimpin sudah berlangsung, hal ini berarti kedaulatan rakyat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.
2. Melalui pemilu warga negara dapat mengapresiasi hak-hak yang dimilikinya secara bebas, termasuk hak mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi berkumpul dan berserikat, kemudian terbentuklah pemerintahan yang memiliki legitimasi (pengakuan dari rakyat) sehingga pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai. Dengan pemilu juga dapat berlangsungnya rekrutmen politik secara terbuka, dimana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan publik.
3. Melalui pemilu, konflik kepentingan yang ada di tengah masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik bisa diselesaikan secara kelembagaan tanpa adanya kekerasan. Hal ini merupakan pendidikan politik kepada semua warga negara, karena dalam

pemilu warga negara dididik untuk memahami hak-hak dasarnya, sekaligus tanggung jawab sosial terhadap keutuhan negara

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; bisaanya disebut Sistem Distrik)
2. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; bisaanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)¹⁹

a. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002 pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres juga di masukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pada tahun 2007 berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1993 hal 461

1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Adapun jumlah partai yang mengikuti pemilu di setiap tahunnya mengalami perbedaan yang cukup signifikan mulai dari 27 partai pada 1995, 10 partai pada 1971, 3 partai pada tahun 1977-1997, 48 partai pada tahun 1999, 24 partai pada tahun 2004, 38 partai pada tahun 2009, dan 12 partai pada tahun 2014. Dengan mengusung sistem proporsional yakni sistem yang menentukan dalam satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu²⁰. Sistem proporsional yang awalnya bersifat tertutup pada tahun 2004 berubah menjadi sistem proporsional terbuka sehingga memudahkan masyarakat serta kontestan untuk dapat mengetahui berapa hasil suara yang mereka dapatkan pada pemilihan umum tersebut.

Pemilihan umum di Indonesia menganut Asas “LUBER” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia” yang sudah ada sejak zaman Orde Baru, kemudian pada masa reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”²¹. Azas tersebut memiliki makna tersendiri yakni :

- **Langsung** : pemilih diharuskan memberikan suaranya langsung tanpa perantara dan tidak boleh adanya perwakilan

²⁰ Ibid hal 463

²¹ http://www.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_di_Indonesia diakses pada tanggal 9/10/2014 pukul 16.00

- **Umum** : pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- **Bebas** : pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
- **Rahasia** : suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri
- **Jujur** : pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih
- **Adil** : perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas ini mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, melainkan penyelenggara pemilu.

b. Pemilu Presiden (pilpres)

Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjelaskan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan wakil presiden adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas pemilu yang dilaksanakan setiap 5

tahun sekali dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemilu presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (bawaslu).

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden, ada tahapan yang harus diikuti yakni penyusunan daftar pemilih, pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, serta pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Setelah melaksanakan penetapan calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan oleh partai politik, maka tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai adalah mendaftarkan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap partai politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bakal pasangan calon yang telah didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh KPU, kemudian KPU melakukan verifikasi terhadap berkas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrative bakal pasangan calon paling lama empat hari sejak diterimanya surat pencalonan. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan

dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Penetapan dan pengumuman pasangan calon dilakukan oleh KPU yang ditetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden, satu hari setelah melakukan verifikasi. Penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

Tahapan selanjutnya setelah pengumuman pasangan calon ialah masa kampanye. Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik. Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, diikuti oleh peserta kampanye yakni masyarakat, dan didukung oleh petugas kampanye. Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai metode yakni pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU, debat pasangan calon tentang materi kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan

perundang-undangan. Adapun materi kampanye yang disampaikan meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.

Setelah melaksanakan tahap kampanye barulah masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada hari yang telah ditentukan oleh KPU dengan ketentuan ia telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang bersangkutan atau sebagai pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. Proses pemilihan dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak di seluruh provinsi di Indonesia, penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. Penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara disaksikan dan dicatat pelaksanaannya oleh saksi. Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Hasil rekapitulasi setiap TPS tersebut diserahkan kepada kecamatan kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota dan hasil tersebut digabungkan di KPU Provinsi dan kemudian di akumulasi di KPU pusat.

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua pasangan calon atau lebih, kedua

pasangan tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Pasangan calon terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila calon wakil presiden terpilih berhalangan untuk datang sebelum pelantikan, calon presiden terpilih berhalangan untuk datang sebelum pelantikan, calon presiden terpilih dilantik menjadi presiden, begitu pula sebaliknya apabila calon presiden berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon wakil presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.

3. Calon Presiden (Capres)

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon dalam UU No. 42 tahun 2008 adalah pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 5 pada Bab III di UU No 42 tahun 2008 menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden apabila ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam sebuah pemilu, persyaratan tersebut meliputi kemampuannya secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, tidak pernah mengkhianati negara dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak

sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak hanya itu persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPTP-PWPO).

Apabila calon presiden berasal dari kalangan pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri sebagai pejabat negara paling lambat saat di daftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Saat pengunduran diri sebagai pejabat negara disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden harus meminta izin kepada presiden. Surat permintaan izin tersebut disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Penentuan calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, pasangan yang sudah dicalonkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya²². Pengumuman bakal calon presiden dan wakil presiden dapat dilaksanakan pada kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

²² UU No 42 tahun 2008, Bab III, bagian kedua pasal 10, hal 8

4. Relasi Militer dan Politik

Militer merupakan institusi yang profesional dan eksklusif. Relasi sipil dan militer di dalam suatu negara pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari karakteristik sistem politiknya. Di negara otoriter atau totaliter, pengaruh militer dalam kehidupan politik sangat besar, lain halnya di negara-negara demokratis, pengaruh militer cenderung mengecil, karena adanya paradigma supremasi sipil atas militer, militer dengan demikian berada di bawah kendali politisi sipil. C. Wright Mills (1956) pernah menyebutkan bahwa militer merupakan satu dari tiga kelompok yang paling berpengaruh secara politik, pengaruh itu khususnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertahanan dan politik luar negeri²³.

Eric Nordlinger (1977) yang menaruh minat kuat pada studi-studi militer member sebutan 'tentara-tentara *praetorian*' bagi militer yang terlibat di dalam politik. Nordlinger menggambarkan *praetorianisme* sebagai 'situasi di mana anggota militer merupakan aktor politik utama karena menggunakan kekuatan nyata atau ancaman yang mereka miliki' (Nordlinger, 1977:2). Terlepas dari fakta bahwa militer di sejumlah negara telah melakukan intervensi politik, derajat keterlibatannya tidak sama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.

Ada tiga model mengenai relasi antara sipil dan militer sebelum Nordlinger dan ilmuwan lain menaruh perhatiannya terhadap studi-studi

²³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 243

tentang militer²⁴. Pertama adalah model tradisional. Model ini diambil dari apa yang pernah terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 dalam kerajaan-kerajaan monarki di Eropa. Para demokrat di kerajaan-kerajaan Eropa membentuk kelompok sipil (birokrasi) dan militer pada saat yang bersamaan.

Yang kedua adalah model liberal, yaitu adanya supremasi sipil atas militer yang lebih jelas lagi dari model yang pertama. Kejelasan demikian dimungkinkan karena ada perbedaan keahlian dan tanggung jawab antara sipil dengan militer. Kelompok sipil memegang kekuasaan atas pemerintah, baik karena dipilih (*elected*) maupun ditunjuk (*appointed*).

Ketiga adalah model penetrasi, sebagaimana pernah terjadi di negara-negara komunis atau totaliter. Di dalam model ini militer memiliki pengaruh politik atas pemerintahan yang ada, misalnya melalui penetrasi gagasan-gagasan politik. Proses ini dilaksanakan mulai di bangku pendidikan militer sampai ketika mereka berkarier di dalam organisasi kemiliteran.

Konsep ‘tentara praetorian’ ini tidak dikembangkan sendiri oleh Nordlinger, melainkan juga oleh ilmuwan politik lain seperti Samuel P. Huntington (1968) dan Amos Perlmutter (1997). Meskipun sama-sama membagi keterlibatan militer kedalam tiga kategori, apa yang dikemukakan Perlmutter berbeda dengan yang dikemukakan oleh Nordlinger. Adapun ketiga kategori tersebut adalah : pertama, autokratik praetorian atau ‘*the personalist*’, yakni ketika terdapat seorang penguasa yang sangat berkuasa di dalam suatu negara. Karena itu kategori ini juga sering disebut ‘*a despot-tyrant*’ seperti di

²⁴ Ibid hal 245-246

Idi Amin di Uganda, atau juga disebut ‘*the despot-patrimonial*’ seperti Samoza di Nikaragua. Kategori yang kedua adalah oligarki praetorian manakala secara struktural kekuasaan dikendalikan oleh sejumlah orang, seperti pernah terjadi di Irak, Mesir, dan Syria. Yang terakhir adalah kategori korporatis praetorian, di dalam kategori ini kekuasaan di dasarkan pada korporatisme dan klientelisme.

Profesionalisme militer yaitu memiliki keahlian dengan cara kekerasan baik secara langsung maupun tidak. Profesionalisme dalam pandangan Huntington harus mencakup keahlian, tanggung jawab dan kesatuan. Menurut Huntington, semakin tinggi profesionalisme perwira militer, semakin berkurang kecenderungan mereka melakukan intervensi diluar non-militer. Sebaliknya bila kecakapan itu tidak dihargai, maka tidak banyak yang dilakukan oleh perwira militer untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam mempertahankan negara, sementara cita-cita pribadi tidak mempunyai jalan keluar untuk mendapatkan keahlian sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat. Perwira seperti ini cenderung melibatkan dirinya dalam politik sebagai satu kegiatan sampingan²⁵.

Samuel E. Finner dalam bukunya *The Man On Horseback: The Role of Military Politics*, mengemukakan bahwa disamping mempertanyakan mengapa militer masuk kedalam politik, kita seharusnya juga bertanya mengapa mereka mau melakukannya. Tampaknya keuntungan politik dari militer lebih banyak dibandingkan dengan kelompok sipil dan kelompok

²⁵ Eric a. Nordlinger, “*Militer dalam Politik*”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 73

lainnya. Militer memiliki organisasi yang lebih unggul dan mereka memiliki senjata²⁶. Samuel E. Finner mengidentifikasi enam model intervensi militer yaitu : 1) melalui saluran konstitusional yang resmi; 2) kolusi atau kompetisi dengan otorita sipil; 3) intimidasi terhadap otoritas sipil; 4) ancaman nonkooperasi dengan, atau kekerasan terhadap otoritas sipil; 5) kegagalan untuk mempertahankan otoritas sipil menentang kekerasan; dan 6) penggunaan kekerasan terhadap otoritas sipil²⁷.

Kasus Indonesia memberi ilustrasi bahwa upaya membangun tentara yang profesional dan adanya control sipil atas militer bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa bangunan negara demokrasi pasca pemerintahan Soeharto tidak mudah diwujudkan karena kekuatan lama masih menjadi bagian penting di dalam pemerintahan baru.

F. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

1. *Persepsi* merupakan proses yang terjadi dalam diri seseorang dalam menanggapi suatu informasi atau memberi tafsiran terhadap suatu objek berdasarkan faktor pengalaman, pengetahuan, konsep, dan faktor lingkungan.

²⁶ Samuel E. Finner, "The Man On Horseback : The Role of Military in Politics", dalam Op. cit Arif yulianto, Hal 78

²⁷ Ibid hal 79

2. *Pemilihan Presiden (pilpres)* merupakan proses pemilihan seorang presiden dan wakil presiden dalam sebuah negara demokrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dilaksanakan secara bersamaan.
3. *Calon Presiden (capres)* merupakan seorang kandidat yang ditunjuk oleh partai politik atau penggabungan partai politik yang emndukungnya untuk mencalonkan diri pada pemilu presiden tahun 2004, 2009, 2014.
4. *Militer* merupakan lembaga yang dipersenjatai untuk bertugas mempertahankan kedaulatan suatu negara, dan memiliki latar belakang tentara baik masih aktif maupun sudah pensiun (purnawirawan).

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Melalui definisi operasional akan ditentukan gejala atau indikator variabel dan bagaimana mengukur gejala atau indikator tersebut.

Persepsi yang didasari sikap masyarakat Kecamatan Wirobrajan terhadap calon presiden yang memiliki latar belakang militer merupakan salah satu langkah yang dapat menentukan karakteristik pemimpin yang baik di sebuah negara. Definisi operasional yang digunakan penulis merujuk pada teori persepsi yang dikemukakan oleh Kasali (1994:23) yakni yang berkaitan

dengan faktor penentu persepsi. Adapun aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Budaya
 - a. Persepsi masyarakat berdasarkan suku bangsa dan adat istiadat
 - b. Persepsi masyarakat berdasarkan kultur lingkungan tempat tinggal
2. Pengalaman Masa Lalu
 - a. Persepsi masyarakat berdasarkan rekam jejak calon presiden
 - b. Penilaian masyarakat berdasarkan pengalaman politik dalam pemilu presiden
3. Nilai-nilai yang dianut
 - a. Pandangan masyarakat terhadap sosialisasi visi dan misi calon presiden
 - b. Ketertarikan masyarakat terhadap karakteristik calon presiden
4. Berita berita yang berkembang
 - a. Penilaian masyarakat terhadap kampanye negatif yang terjadi pada pemilu presiden
 - b. Persepsi masyarakat berdasarkan peranan media masa dalam upaya pemberitaan calon presiden.

H. Metode Penelitian

Pengertian metode menurut Winarno Surachmad merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan mempergunakan teknik dan alat-alat tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisa kuantitatif. Metode penelitian ini merupakan suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang.

Adapun pendekatan kuantitatif digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian metode dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.
- b. Peneliti dan informan dapat berperan secara bersamaan, dalam arti tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
- c. Terdapat kemungkinan, fenomena secara keseluruhan mempengaruhi variabel-variabel penelitian sehingga dapat melihat kaitan antar variabel-variabel yang ada.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wirobrajan, alasan pengambilan lokasi di Kecamatan Wirobrajan karena dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta Kecamatan Wirobrajan merupakan kecamatan yang berada di tengah-tengah baik dari segi jumlah penduduk,

luas wilayah, tingkat perekonomian swadaya, maupun letak geografisnya. Tidak hanya itu penduduk Kecamatan Wirobrajan yang majemuk menjadi daya tarik penulis dalam melaksanakan penelitian ini, dimana pada Kecamatan ini dapat ditemukan banyaknya pendatang dari luar provinsi DIY yang menetap di wilayah ini untuk menempuh pendidikan maupun membuka peluang karir, sehingga persepsi masyarakat terkait pencalonan presiden pun berbeda pula sesuai dengan karakteristik individu yang ada di Kecamatan wirobrajan ini. dengan adanya pendatang yang menetap di wilayah Kecamatan Wirobrajan ini dapat mempengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat asli Yogyakarta terhadap capres yang berlatar belakang militer karena perbedaan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat setempat dengan pendatang yang menetap di Kecamatan tersebut.

Fenomena pemilu presiden di Kecamatan Wirobrajan juga menjadi daya tarik penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayah ini hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi karakter kepemimpinan presiden di setiap pemilu. Pada pemilu tahun 2004 putaran pertama di kecamatan Wirobrajan kemenangan diraih oleh pasangan Amin Rais-Siswono Yudohusodo sejumlah 6.526 suara dimana pasangan ini merupakan pasangan berlatar belakang politisi, sedangkan pada pemilu putaran kedua diraih oleh pasangan SBY-JK dengan jumlah suara 8.424 suara yang merupakan pasangan yang berlatar belakang militer. Pada pemilu tahun 2009 kemenangan diraih oleh pasangan militer yakni SBY-

Boediono sejumlah 6.582 suara, dan pada pemilu presiden tahun 2014 kemenangan diraih oleh pasangan Jokowi-JK sejumlah 9.629 suara yang merupakan pasangan dari kalangan pengusaha²⁸. Dari perbandingan hasil pemilu presiden yang terjadi di Kecamatan Wirobrajan dapat dilihat bahwa masyarakat Wirobrajan memiliki perbedaan karakteristik di setiap pemilu presiden. Kemenangan calon presiden di Kecamatan Wirobrajan dapat dipengaruhi oleh basis masa partai pendukung pasangan calon presiden dan karakter tokoh yang mencalonkan diri sebagai presiden, dengan dinamika politik seperti ini menarik minat penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kecamatan Wirobrajan.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi menurut Sugiyono di definisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Wirobrajan. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dikecamatan Wirobrajan sebesar 24.969 jiwa atau 6,34% dari seluruh

²⁸ Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Tahun 2004-2009, Data Statistik KPU Kota Yogyakarta

²⁹ Marsi Singarimbun dan Sofian Effendi (ed),1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES

jumlah penduduk Kota Yogyakarta, jumlah penduduk ini menempati posisi ke 7 dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta³⁰.

b. Sampel

Sampling/sampel merupakan contoh sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Menurut Nawawi (1997:44) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penulisan, sebagian individu yang diselidiki itu sebagai sampel atau contoh

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud untuk menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi³¹

Teknik yang digunakan penulis untuk menentukan sampel adalah teknik *simple random sampling* (sampling acak sederhana) yaitu sampel yang diambil secara acak sehingga unit analisa dari populasi punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam penarikan sampel maka jumlahnya harus representatif untuk mengetahui hasil nantinya dapat di generalisasi atau ditarik secara umum. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Wirobrajan yang berjumlah 24.969 orang. Untuk memenuhi

³⁰ Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2013, Bab 3 Penduduk dan Tenaga Kerja

³¹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2002, hal 109

persyaratan tersebut maka dalam penentuan jumlah sampel penulis menggunakan rumus *Perhitungan Taro Yamane*, rumus ini digunakan karena populasi yang digunakan lebih dari 500 orang.

Adapun rumus sederhana yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{24.969}{24.969 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{24.969}{250,69}$$

$n = 99,6$ orang dibulatkan menjadi 100 orang

Keterangan :

n = besarnya ukuran sampel

N = besaran populasi

d^2 = presisi yang diinginkan untuk diambil “10%”

Sampel diambil dari total populasi sebagai wakil dari total populasi. Maka dari itu sampel yang didapat dari populasi masyarakat Kecamatan Wirobrajan sebanyak 24.969 orang adalah 100 orang sampel. Untuk teknik penarikan sampel, penulis menggunakan *Simple Random Sampling*. Yaitu dengan cara mengundi secara acak nomor atau angka yang keluar itulah yang dijadikan sampel, yaitu sebanyak 100 orang.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden berupa keterangan masyarakat Kecamatan Wirobrajan yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap capres berlatar belakang militer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel ilmiah, website, jurnal, rujukan skripsi terdahulu, catatan-catatan, koran dan dokumen lainnya yang punya keterkaitan dengan tema penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulir, diajukan kepada masyarakat Kecamatan Wirobrajan yang dijadikan sampel sebanyak 100 orang untuk mendapatkan jawaban secara tertulis

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (surakhmad, 1994)³². Adapun pihak yang di wawancarai adalah Masyarakat Kecamatan Wirobrajan yang menjadi sampel dalam penelitian persepsi masyarakat ini sebagai pelengkap data pada saat proses pemberian kuisisioner.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data sekunder yang telah ada terlebih dahulu dengan cara membaca buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan terbitan ilmiah yang lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Untuk mengolah data hasil kuisisioner, penulis menggunakan teknik analisis data. Setelah itu data dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan apakah responden telah mengisi kuisisioner dengan benar, kemudian melakukan pengkodean, yaitu memberikan hasil tertentu pada data yang telah diperiksa untuk menyederhanakan jawaban responden. Setelah itu dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif yaitu suatu model penelitian yang menitik beratkan pada masalah atau peristiwa yang sedang berlangsung dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi dan kondisi yang ada,

³² Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Bandung* : Alfabeta, hal 92

kemudian dianalisis dengan teknik analisis data statistik kualitatif. Sedangkan untuk menyimpulkan data yang diperoleh dari kuisisioner penulis menggunakan skala indeks.

Rumus mencari indeks³³:

$$I = \frac{3F1 + 2F2 + 1F3}{N}$$

Keterangan :

I = Indeks

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel

Sedangkan penghitungan nilai interval dari nilai indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyaknya Kriteria}}$$

Dengan kategori sebagai berikut :

2,35 - 3,0 : termasuk kategori tinggi

1,68 – 2,34 : termasuk kategori sedang

1,0 – 1,67 : termasuk kategori rendah

³³ Suranto, *Bahan Ajar Statistik Sosial*